

KATALOG: 9302020.1606

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MENURUT PENGELUARAN

2018-2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

MENURUT PENGELUARAN

2018-2022



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MENURUT PENGELUARAN 2018- 2022**

ISSN : 2776-6667
Nomor Publikasi : 16060.2305
Katalog BPS : 9302020.1606
Ukuran Buku : 21,0 x 29,7 cm
Jumlah Halaman : x + 64 halaman

Naskah:
Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Gambar Kulit:
Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:
©Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Banyuasin

Dicetak Oleh:
CV. Vika Jaya

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/ atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
MENURUT PENGELUARAN 2018- 2022**

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Trio Wira Dharma, S.ST.

Editor : Vivi Yuliyantika, S.ST.

Penulis : Rahma Ardani, S.Tr.Stat.

Pengolah Data : Rahma Ardani, S.Tr.Stat.

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangkat data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). Perangkat data ini dapat pula digunakan untuk kepentingan dan tujuan lain, seperti sebagai dasar pengembangan model-model ekonomi dalam rangka menyusun formulasi kebijakan, tingkat percepatan uang beredar (*velocity of money*), pendalaman sektor keuangan (*financial deepening*), penetapan pajak, kajian ekspor dan impor dan sebagainya.

Menurut teori ekonomi makro, penghitungan PDRB dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: pendekatan produksi/penyediaan (PDRB menurut Lapangan Usaha/*industry*), pendekatan pengeluaran/permintaan akhir (PDRB menurut Pengeluaran/*expenditure*) serta pendekatan pendapatan (PDRB menurut pendapatan/*income*). Ketiga pendekatan penghitungan tersebut secara teori akan menghasilkan angka PDRB yang sama.

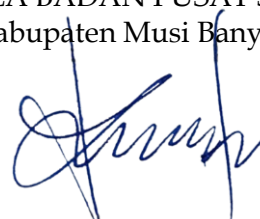
Publikasi ini secara khusus membahas mengenai PDRB menurut pendekatan pengeluaran/permintaan akhir. Pendekatan ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, serta Ekspor Neto Antar Daerah (ekspor antar daerah dikurangi dengan impor antar daerah). Data PDRB dalam publikasi ini serta publikasi-publikasi selanjutnya menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep *System of National Accounts 2008* seperti yang direkomendasikan oleh *United Nations*.

Kepada seluruh anggota Tim Penyusun Publikasi ini yang telah memberikan kontribusinya dalam mewujudkan publikasi ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Demikian pula kepada instansi pemerintah dan lembaga/perusahaan swasta yang telah memberikan dukungan data bagi penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih. Semoga kerjasama yang telah terjalin selama ini dapat terus berlanjut serta dapat ditingkatkan di masa-masa mendatang.

Disadari bahwa data dan informasi yang disajikan dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat dihargai demi penyempurnaan isi publikasi ini selanjutnya. Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Sekayu, April 2023

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Kabupaten Musi Banyuasin,



TRIO WIRA DHARMA, S.ST., M.M.

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	2
1.2. Kegunaan Statistik PDRB	5
BAB II METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA	6
2.1. Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	7
2.2. Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	11
2.3. Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	14
2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	17
2.5. Perubahan Inventori	22
2.6. Ekspor Impor	26
BAB III TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018-2022	28
3.1. Tinjauan Agregat PDRB Menurut Pengeluaran	30
3.2. Perkembangan Konsumsi Akhir Rumah Tangga	36
3.3. Perkembangan Konsumsi Akhir LNPRT	41
3.4. Konsumsi Akhir Pemerintah	42
3.5. Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	44
3.6. Perkembangan Perubahan Inventori	46
3.7. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa.....	48

BAB IV	PERKEMBANGAN AGREGAT PRDB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018-2022.....	50
4.1	PDRB (Nominal)	51
4.2	Proporsi Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB.....	52
4.3	Incremental Capital Output Ratio (ICOR).....	53
BAB V	PENUTUP	54
	LAMPIRAN	56
	DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	30
Tabel 2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	31
Tabel 3	Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	33
Tabel 4	Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	34
Tabel 5	Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	35
Tabel 6	Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	36
Tabel 7	Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	38
Tabel 8	Pertumbuhan Rill Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	39
Tabel 9	Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	40
Tabel 10	Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRRT Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	41
Tabel 11	Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	42
Tabel 12	Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	44
Tabel 13	Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	46
Tabel 14	Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	48
Tabel 15	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	51

Tabel 16	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	52
Tabel 17	<i>Incremental Capital Output Ratio (ICOR)</i> Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022	53

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

DAFTAR GRAFIK

Halaman

Grafik 1	Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin, 2018-2022 (miliar rupiah)	32
----------	---	----

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (juta rupiah)	57
Lampiran 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (juta rupiah)	58
Lampiran 1.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)	59
Lampiran 1.4 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)	60
Lampiran 1.5 Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022	61
Lampiran 1.6 Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)	62

BAB I

PENDAHULUAN

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

1

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah/regional dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang pada suatu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran serta struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi pada suatu periode ke periode (tahun ke tahun atau triwulan ke triwulan). Dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 dan ini tentu akan mencerminkan struktur ekonomi terkini.

Terdapat tiga pendekatan yang biasanya digunakan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

a. Menurut Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan

9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
12. Real Estate
13. Jasa Perusahaan
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15. Jasa Pendidikan
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
17. Jasa lainnya

Setiap kategori lapangan usaha tersebut dirinci lagi menjadi sub-sub kategori lapangan usaha.

b. Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto (pajak atas produksi dan impor dikurangi subsidi).

c. Menurut Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari:

1. Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Secara konsep ketiga pendekatan tersebut akan menghasilkan angka yang sama. Jadi, jumlah pengeluaran akan sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksi. PDRB yang dihasilkan dengan cara ini disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar, karena di dalamnya sudah dicakup pajak tak langsung neto.

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

1.2 KEGUNAAN STATISTIK PDRB

Data pendapatan regional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB harga berlaku menurut pengeluaran menunjukkan produk barang dan jasa digunakan untuk tujuan konsumsi akhir, investasi dan diperdagangkan dengan pihak luar negeri.
5. Distribusi PDRB menurut pengeluaran menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
6. PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi akhir, investasi dan perdagangan luar negeri.
7. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
8. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

BAB II

METODE ESTIMASI DAN SUMBER DATA

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

2

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

a. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumah tangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

b. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

c. Cakupan

PKRT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (*United Nations*), sbb:

1. Makanan dan Minuman Tidak Beralkohol
2. Minuman Beralkohol, Tembakau dan Narkotik
3. Pakaian dan Alas Kaki
4. Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya
5. *Furniture*, Perlengkapan Rumah Tangga dan Pemeliharaan Rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/Hiburan dan Kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan Makan Minum dan Penginapan/Hotel

12. Barang dan Jasa Lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);
Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).
- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen di luar wilayah atau di luar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PKRT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal didalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

d. Penghitungan PKRT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per-kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per-kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data Sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PKRT didasarkan pada hasil Susenas. Akan tetapi, karena hasil estimasi data pengeluaran rumah tangga yang berasal dari Susenas cenderung *underestimate* (terutama untuk kelompok bukan makanan dan kelompok makanan jadi), maka perlu dilakukan penyesuaian (*adjustment*). Dalam melakukan *adjustment*, digunakan data sekunder dalam bentuk data atau indikator *suplay* dari berbagai sumber data di luar Susenas. Setelah diperoleh hasil *adjustment*, maka yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan pada data sekunder. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu. Hal ini dilakukan karena hasil penghitungan dari data sekunder dianggap lebih mencerminkan PKRT yang sebenarnya.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PKRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PKRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *mendeflate* PKRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah penghitungan PKRT dapat diringkas sbb:

- i. Estimasi PKRT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu $\times (30/7) \times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan $\times 12 \times$ jumlah penduduk pertengahan tahun
- ii. Data poin ke 1 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas yang mungkin dikontrol secara tersendiri;
- iii. Terhadap data poin ke-3 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas dari jenis pengeluaran tertentu;
- iv. Diperoleh nilai PKRT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
- v. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
- vi. PKRT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke-4 dengan hasil poin ke-5.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

a. Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumah tangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

b. Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumah tangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- Pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- Setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau *surplus*, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- Kebijakan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus; dan
- Istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan *surplus* melalui kegiatan produktifnya, namun *surplus* yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumah tangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu:

1. Organisasi Kemasyarakatan
2. Organisasi Sosial
3. Organisasi Profesi
4. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olah Raga/Hobi
5. Lembaga Swadaya Masyarakat
6. Lembaga Keagamaan
7. Organisasi Bantuan Kemanusiaan/Beasiswa

c. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasar tersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari:

1. Konsumsi antara, contoh: pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
2. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya
3. Penyusutan
4. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

d. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SK-LNP).

Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.

- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.

Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.

- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sbb :

- i. Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sbb :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : Jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- ii. Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sbb:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh Berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

a. **Pendahuluan**

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

b. **Konsep dan Definisi**

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sbb:

1. Memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh, aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh, aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan

yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi (pendapatan jasa).

c. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik provinsi, kabupaten/kota, maupun desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup :

1. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Provinsi;
2. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan;
3. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi;
4. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

d. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- Output Bank Indonesia (BI)
- Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

i. PK-P Provinsi adh Berlaku

Secara umum, PK-P adh Berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P adh Berlaku} = \text{Output non pasar-penjualan barang dan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non-pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yang dikeluarkan, yaitu : belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level provinsi, PK-P Provinsi adh Berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

ii. PK-P Provinsi adh Konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah adh Konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Regional Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

a. **Pendahuluan**

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

b. **Konsep dan definisi**

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidayakan. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto" mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

c. **Cakupan**

Pembentukan Modal Tetap Bruto terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal,

bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagai-nya;

2. Biaya alih kepemilikan aset non-finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;

Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya (seperti overhaul mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

d. Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data

- Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.
- Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- Laporan keuangan perusahaan.
- Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas).
- Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- Publikasi Statistik Konstruksi.
- Data Eksplorasi Mineral dari Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode Penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung

berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “ arus komoditas”. Dalam hal ini penyediaan atau “supply” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga (adh) pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/ data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai adh berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB adh Konstan, maka PMTB adh Berlaku tersebut di “deflate” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasikan menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output industri konstruksi, baik adh Berlaku maupun adh Konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkut dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkut dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya

angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB adh Berlaku. Untuk memperoleh nilai adh Konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB (adh Berlaku) dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan kedua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikan PMTB adh Konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB adh Konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB adh Berlaku, nilai PMTB adh Konstan tersebut di “*reflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB adh Konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB adh Berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator (barang modal impor kode HS 2 digit). Kedua, untuk memperoleh PMTB adh Konstan adalah dengan cara men-“*deflate*” PMTB adh Berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB adh Berlaku untuk barang modal tidak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan adh Berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB adh Berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang *software*. Untuk adh Konstan diperoleh dengan men-*deflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data Impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB adh Konstan-nya diperoleh dengan cara *mendeflate* nilai adh Berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tidak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung statis. Untuk memperbaikinya diperlukan survei dalam skala yang besar.
- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

2.5 PERUBAHAN INVENTORI

a. **Pendahuluan**

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

b. **Konsep dan definisi**

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna pertambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak

goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

c. Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sbb :

1. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
2. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
3. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
4. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
5. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
6. Ternak untuk tujuan dipotong;
7. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
8. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

d. Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD

- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang;
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan
- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Di lihat dari sisi manfaatnya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

Pendekatan Langsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori *adh Berlaku*, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sbb :

- i. Menghitung posisi inventori *adh Konstan*, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- ii. Menghitung perubahan inventori *adh Konstan* dengan mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan
- iii. Menghitung perubahan inventori *adh Berlaku* dengan *menginflate* perubahan

inventori adh Konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori adh Berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori adh Konstan dihitung dengan:

- i. Mendeflate nilai perubahan inventori adh Berlaku dengan indeks harga yang sesuai
- ii. Mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harga-nya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;
- Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia.

2.6 EKSPOR IMPOR

a. Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan dibidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor disuatu wilayah menjadi semakin berkembang.

b. Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah atau pun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non-residen yang berada di luar wilayah tersebut.

c. Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

1. Ekspor/impor barang dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut
2. Ekspor/impor jasa dari/ke Luar Negeri ke/dari provinsi tersebut

Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya

3. Net Ekspor antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

d. Penghitungan Ekspor Impor Tahunan

1. Sumber data

- Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi di jembatan timbang;
- Informasi lalu-lintas barang yang keluar-masuk provinsi dari hasil survei.
- Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-Impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board* (fob) dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan Impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan net ekspor antar wilayah merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN BERDASARKAN PDRB PENGELUARAN TAHUN 2018-2022

3

Adanya perubahan kondisi ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin akibat proses pembangunan ekonomi yang terjadi pada periode 2018 s.d 2022 tak lepas dari pengaruh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal lebih dipengaruhi oleh perkembangan maupun perubahan perilaku masing-masing komponen pengeluaran akhir. Sedangkan faktor eksternal banyak dipengaruhi oleh perubahan teknologi dan struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional.

Pada awal tahun 2020, pandemi virus, yang dikenal dengan nama Covid-19 melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Bahkan WHO mendeklarasikannya sebagai pandemi global. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina diklaim memiliki tingkat penyebaran yang sangat cepat namun belum ditemukan obat yang bisa menyembuhkan pasien penderita Covid-19. Kondisi ini membuat kasus positif terus bertambah signifikan. Bahkan pemerintah membuat rumah sakit darurat untuk menampung para pasien.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengambil berbagai strategi dan langkah untuk memutuskan rantai penyebaran virus ini. Pada awal pandemi terjadi, pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan sekolah serta bekerja dari rumah. Bahkan beberapa daerah menerapkan *lockdown* sebagai antisipasi darurat dimana masyarakat untuk sementara waktu dicegah memasuki atau meninggalkan area atau bangunan yang telah ditentukan guna menghindari ancaman penyebaran virus Covid-19 yang lebih luas lagi. Seluruh aktivitas masyarakat menjadi terbatas dan tempat transaksi ekonomi, mulai dari kantor, toko, pusat perbelanjaan, sampai bandara pun ditutup. Hanya toko atau supermarket yang menjual kebutuhan pokok yang masih diperbolehkan untuk tetap buka. Kondisi ini tidak hanya membuat kehidupan sosial masyarakat berubah namun juga membuat perekonomian terguncang, tak terkecuali di Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk menyelamatkan ekonomi yang terganggu akibat dari pandemi Covid-19 ini, pada tahun akhir tahun 2020 hingga tahun 2021 akhirnya pemerintah menerapkan tatanan normal baru atau era *new normal*. Dimana beberapa aktivitas masyarakat sudah diperbolehkan namun tetap mematuhi protokol kesehatan. Para karyawan sudah mulai bekerja di kantor atau perusahaan meskipun masih dibatasi jumlahnya. Serta pendidikan level dasar hingga perguruan tinggi mulai melakukan pembelajaran tatap muka dengan jumlah yang terbatas. Upaya ini dinilai mampu membangkitkan ekonomi khususnya pada Kabupaten Musi Banyuasin tahun 2021 hingga 2022, yang berhasil tumbuh dari terjadinya kontraksi di tahun 2020.

3.1 TINJAUAN AGREGAT PDRB KABUPATEN MUSI BANYUASIN MENURUT PENGELUARAN

Tabel 1. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022

Komponen Pengeluaran	<i>(Miliar Rp)</i>				
	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.640,49	53.881,10
2. Konsumsi LNPRT	1.137,73	1.299,67	1.232,91	1.306,02	1.453,40
3. Konsumsi Pemerintah	3.866,85	4.181,84	3.997,61	4.284,66	4.227,08
4. PMTB	19.949,57	19.790,52	20.523,03	20.495,94	21.850,13
5. Perubahan Inventori	-606,79	104,53	-587,56	35,30	-6,56
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.309,00	-5.879,36	-5.737,56	-2.017,68	1.331,39
Total PDRB	60.861,46	65.811,00	65.943,88	72.744,72	82.736,54

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data di atas menunjukkan bahwa setiap komponen pengeluaran mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia di wilayah domestik Kabupaten Musi Banyuasin digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir (Rumah tangga, LNPRT, dan Pemerintah). Sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik (dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori). Untuk lebih jelasnya, perilaku masing-masing komponen pengeluaran itu akan diuraikan pada bagian berikut.

Nilai PDRB Kabupaten Musi Banyuasin (adh Berlaku) selama periode tahun 2018 s.d. 2022 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume.

**Tabel 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018-2022**

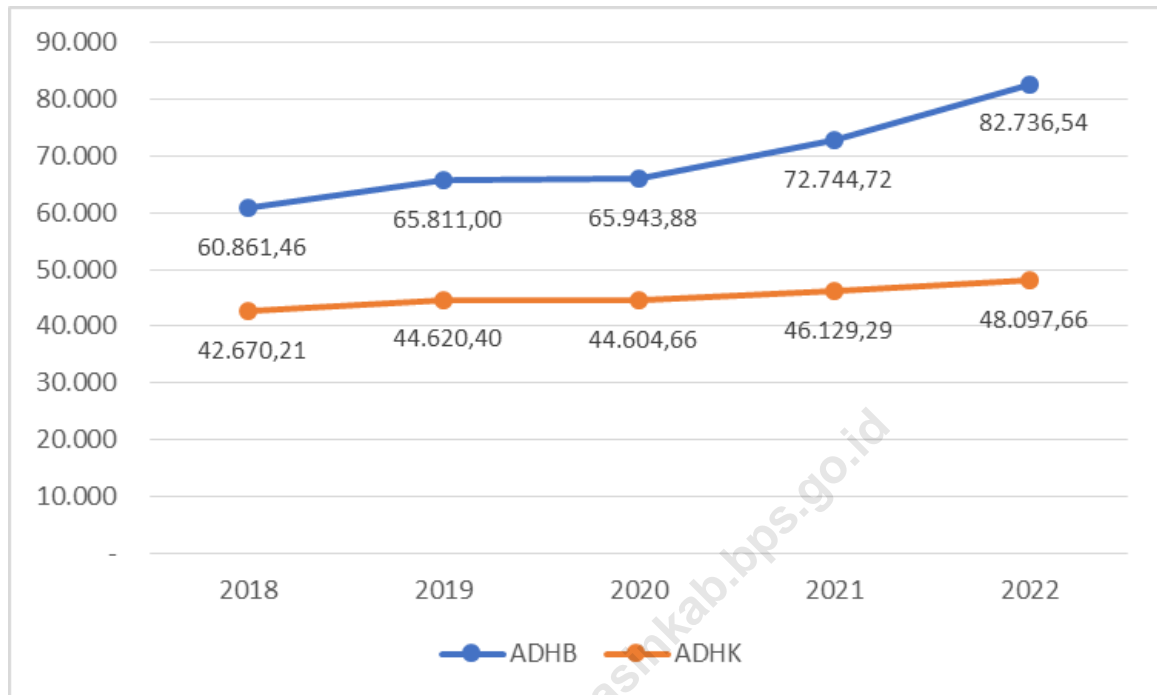
<i>(Miliar Rp)</i>					
Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	27.484,04	28.392,65	27.961,97	28.786,41	30.465,21
2. Konsumsi LNPRT	783,14	852,34	817,05	826,78	880,08
3. Konsumsi Pemerintah	2.802,97	2.937,74	2.803,78	2.852,94	2.912,00
4. PMTB	14.091,52	13.849,00	14.258,45	13.652,04	13.102,41
5. Perubahan Inventori	-500,77	94,91	-586,19	22,39	-6,39
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.990,69	-1.506,24	-650,40	-11,27	744,34
Total PDRB	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.129,29	48.097,66

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Selain dinilai atas dasar harga (adh) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai adh Konstan 2010 atau adh berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan adh Konstan, PDRB di masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB komponen pengeluaran adh Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Selama kurun waktu 2018–2022, gambaran tentang perkembangan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan PDRB adh Konstan dapat dilihat pada tabel 2 di atas. Sama halnya dengan PDRB adh Berlaku, sebagian besar komponen pengeluaran akhir PDRB adh Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan dampak virus Covid-19 yang melanda seluruh dunia.

Grafik 1. Perbandingan PDRB Adh Berlaku dan Adh Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 - 2022 (miliar rupiah)



Dari grafik di atas, nampak bahwa pada umumnya nilai PDRB adh Berlaku selalu lebih besar dari nilai PDRB adh Konstan. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB adh Berlaku. Dalam penghitungan PDRB adh Konstan pengaruh faktor harga telah ditiadakan.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), dan net ekspor barang dan jasa (E).

**Tabel 3. Distribusi PDRB ADHB
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 – 2022**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	72,00	70,37	70,54	66,86	65,12
2. Konsumsi LNPRT	1,87	1,97	1,87	1,80	1,76
3. Konsumsi Pemerintah	6,35	6,35	6,06	5,89	5,11
4. PMTB	32,78	30,07	31,12	28,18	26,41
5. Perubahan Inventori	-1,00	0,16	-0,89	0,05	-0,01
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,01	-8,93	-8,70	-2,77	1,61
Total PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berdasarkan Tabel 3 di atas terlihat bahwa selama periode 2018 – 2022, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (rata-rata di atas 65 persen). Net ekspor barang dan jasa selalu bernilai negatif yang artinya peranan impor relatif lebih besar dibanding ekspor, karena sekitar 40 s.d. 60 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor, baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten. Namun di tahun 2022, net ekspor barang dan jasa berbalik arah menjadi positif, artinya mulai ada pergeseran kebutuhan yang di tahun 2022 pemenuhan kebutuhan dari ekspor lebih besar daripada impor, sejalan dengan tingginya ekspor kategori pertambangan dan penggalian dari Kabupaten Musi Banyuasin ke luar wilayah.

Di sisi lain, pengeluaran untuk kapital (PMTB) juga mempunyai peran relatif besar dengan kontribusi sekitar 26 s.d. 32 persen. Proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentan 5 hingga 6 persen yang menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar.

**Tabel 4. Pertumbuhan PDRB ADHK 2010
Menurut Pengeluaran, Kabupaten Musi Banyuasin
Tahun 2018 – 2022**

Komponen Pengeluaran	<i>(Persen)</i>				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	4,42	3,31	-1,52	2,95	5,83
2. Konsumsi LNPRT	8,29	8,84	-4,14	1,19	6,45
3. Konsumsi Pemerintah	1,72	4,81	-4,56	1,75	2,07
4. PMTB	2,85	-1,72	2,96	-4,25	-4,03
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	3,21	4,57	-0,04	3,42	4,27

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 s.d. 2022 secara rata-rata mencapai 3,09 persen, dengan masing-masing pertumbuhan 3,21 persen (2018); 4,57 persen (2019); -0,04 persen (2020); 3,42 persen (2021); dan 4,27 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 4,57 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu terkontraksi sebesar 0,04 persen.

**Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022**

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	159,45	163,12	166,35	168,97	176,86
2. Konsumsi LNPRT	145,28	152,48	150,90	157,96	165,14
3. Konsumsi Pemerintah	137,96	142,35	142,58	150,18	145,16
4. PMTB	141,57	142,90	143,94	150,13	166,76
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
Total PDRB	142,63	147,49	147,84	157,70	172,02

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sementara itu, indeks implisit¹ PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan pemerintahan) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri) juga menunjukkan peningkatan. Indeks Implisit Kabupaten Musi Banyuasin dari tahun 2018 s.d. 2022 dapat dilihat pada tabel di atas.

¹ Indeks perkembangan

3.2 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA

Konsumsi akhir rumah tangga menempati porsi terbesar dalam PDRB menurut pengeluaran. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana sebagian besar produk domestik dan produk impor digunakan untuk memenuhi konsumsi akhir rumah tangga.

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga					
a. ADHB (<i>miliar Rp</i>)	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.640,49	53.881,10
b. ADHK 2010 (<i>miliar Rp</i>)	27.484,04	28.392,65	27.961,97	28.786,41	30.465,21
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	72,00	70,37	70,54	66,86	65,12
Rata-rata konsumsi per-Rumah Tangga/tahun (<i>ribu Rp</i>)					
a. ADHB	281.492,98	292.680,73	307.393,83	318.252,81	346.010,49
b. ADHK 2010	176.540,76	179.427,75	184.784,59	188.348,38	195.639,72
Rata-rata konsumsi per-kapita/tahun (<i>ribu Rp</i>)					
a. ADHB	68.621,03	71.352,44	74.921,12	77.567,87	85.103,55
b. ADHK 2010	43.036,28	43.742,57	45.037,56	45.906,22	48.118,87
Pertumbuhan ²					
a. Total konsumsi RT	4,42	3,31	-1,52	2,95	5,83
b. Per-RT	2,98	1,64	2,99	1,93	3,87
c. Perkapita	2,98	1,64	2,96	1,93	4,82

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Data berikut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2018 – 2022 konsumsi akhir rumah tangga mengalami peningkatan signifikan baik dalam nominal (*adh Berlaku*) maupun riil (*adh Konstan*), sejalan dengan kenaikan jumlah penduduk maupun jumlah rumah tangga. Perhitungan PDRB per kapita di tahun 2022 mengalami pembaruan, yaitu pada penggunaan data jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2018 menggunakan data jumlah penduduk Proyeksi SP 2010, nilai PDRB per kapita untuk tahun 2019 menggunakan data jumlah penduduk hasil SUPAS 2015, dan nilai PDRB per kapita tahun 2020-2022

² Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

menggunakan data jumlah penduduk Proyeksi Interim SP 2020. Kenaikan jumlah penduduk mendorong terjadinya kenaikan nilai konsumsi rumah tangga, yang pada gilirannya akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB pada periode tahun 2018 s.d. 2022 mengalami fluktuasi dengan titik tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 72,00 persen. Masa pemulihan ekonomi telah mendorong rumah tangga untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga selalu meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022, baik menurut *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Pada tahun 2018, secara umum setiap rumah tangga di Kabupaten Musi Banyuasin menghabiskan dana sekitar 281.429,98 ribu rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 292.680,73 ribu rupiah (2019); 307.393,83 ribu rupiah (2020); 318.252,81 ribu rupiah (2021); dan 346.010,49 ribu rupiah (2022). Pada perkiraan *adh Konstan 2010*, rata-rata konsumsi rumah tangga per rumah tangga pada tahun 2018 hingga 2022 tumbuh pada kisaran 1 persen sampai dengan 3 persen.

Di sisi lain, rata-rata konsumsi per-kapita juga menunjukkan kecenderungan yang searah dengan kenaikan jumlah penduduk, dan selalu diikuti pula oleh kenaikan nilai konsumsinya. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukkan peningkatan, baik *adh Berlaku* maupun *adh Konstan 2010*. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Musi Banyuasin meningkat, baik secara kuantitas (*volume*) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas). Peningkatan rata-rata konsumsi per-kapita secara “riil” berkisar antara 1,64 persen s.d. 4,82 persen pada tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan ini secara otomatis berpengaruh terhadap perubahan struktur konsumsi rumah tangga.

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga *adh Konstan* sebesar 4,42 persen pada tahun 2018. Kemudian, melambat di tahun 2019 menjadi 3,31 persen, selanjutnya pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar 1,52 persen yang disebabkan pandemi Covid-19 yang menyebabkan terbatas hingga hilangnya kesempatan masyarakat untuk mencari pendapatan yang pada akhirnya mempengaruhi konsumsi barang dan jasa, namun kembali tumbuh

positif pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,95 persen hingga di tahun 2022 mencapai 5,83 persen. Sementara itu, pertumbuhan konsumsi per-kapita mengalami fluktuasi dari tahun 2018 sampai dengan 2022 namun tetap tumbuh positif, dengan masing-masing besarnya 2,98 persen di tahun 2018, dan melambat di tahun 2019 menjadi 1,64 persen. Pada tahun 2020 pertumbuhan konsumsi per-kapita kembali meningkat menjadi 2,96 persen, kemudian melambat menjadi 1,93 persen pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4,82 persen di tahun 2022.

Tabel 7. Struktur Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022³

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	60,54	60,40	60,99	60,87	61,34
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,72	3,70	3,73	3,79	3,75
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	9,75	9,92	9,90	10,00	10,04
d. Kesehatan & Pendidikan	6,45	6,46	6,72	6,75	6,58
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	10,30	10,44	9,93	9,79	9,67
f. Hotel & Restoran	6,56	6,47	5,95	6,00	5,97
g. Lainnya	2,68	2,62	2,77	2,81	2,66
Total Konsumsi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara rata-rata dari tahun 2018 s.d. 2022, nampak pada struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Musi Banyuasin, bahwa konsumsi makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi bukan makanan. Proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung masih berada pada kisaran yang sama. Proporsi untuk makanan pada masing-masing tahun mencapai 60,54 persen (2018); 60,40 persen (2019); 60,99 persen (2020); 60,87 persen (2021) dan 61,34 persen (2022).

³Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

Pola proporsi konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non makanan yang masih cukup kuat, sungguhpun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan ekonomi sosial dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan dan sebagainya.

Tabel 8. Pertumbuhan Riil Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,68	4,00	-1,23	3,60	6,09
b. Pakaian dan Alas Kaki	3,00	2,29	-0,51	0,15	4,10
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,30	2,47	-0,26	0,71	6,57
d. Kesehatan & Pendidikan	4,25	3,44	2,91	2,94	3,55
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,60	1,98	-4,66	1,93	5,77
f. Hotel & Restoran	6,26	1,54	-7,50	3,37	7,66
g. Lainnya	3,59	2,27	2,69	3,17	2,72

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Dilihat dari pertumbuhan “riil” nya, pengeluaran rumah tangga untuk setiap kelompok konsumsi menunjukkan fluktuasi. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kemakmuran masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Penggunaan Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022⁴

Kelompok Konsumsi	(Persen)				
	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,17	1,38	2,69	0,74	5,21
b. Pakaian dan Alas Kaki	2,93	2,72	1,90	5,83	5,45
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,00	4,85	0,58	4,79	4,40
d. Kesehatan & Pendidikan	3,91	2,37	1,53	2,00	4,28
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,19	5,03	0,22	1,11	3,46
f. Hotel & Restoran	2,16	2,69	-0,06	1,96	2,30
g. Lainnya	5,14	0,89	3,31	2,85	2,19

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam tabel 9, menunjukkan pergerakan yang fluktuatif setiap tahunnya untuk setiap kelompok konsumsi. Peningkatan harga (inflasi) relatif tinggi terjadi pada tahun 2022 pada kelompok makanan sebesar 5,21 persen. Peningkatan harga konsumsi pakaian dan alas kaki tertinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu sebesar 5,83 persen. Pada kelompok perumahan, perkakas, perlengkapan dan penyelenggaraan rumah tangga, terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan pada tahun 2018 mencapai 6,00 persen. Dengan adanya program kesehatan dan pendidikan gratis di Kabupaten Musi Banyuasin, harga pada kelompok ini cenderung stabil namun mengalami kenaikan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 4,28 persen. Kemudian pada kelompok berikutnya yaitu transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2019 hingga 5,03 persen. Pada kelompok hotel dan restoran, peningkatan harga tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 2,69 persen. Sedangkan pada kelompok konsumsi lainnya memiliki kenaikan tertinggi sebesar 5,14 persen di tahun 2018.

⁴Tingkat perubahan harga produk konsumsi

3.3 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR LNPRT

Konsumsi akhir LNPRT peranannya dalam PDRB menurut pengeluaran sangat minor dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peranan institusi ini dalam perekonomian suatu wilayah semestinya dapat lebih ditingkatkan lagi. Data berikut menunjukkan hal tersebut, dimana hal tersebut dapat dilihat dari proporsinya terhadap PDRB yang minor.

**Tabel 10. Perkembangan Penggunaan Konsumsi LNPRT
Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022**

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB (Miliar Rp)	1.137,73	1.299,67	1.232,91	1.306,02	1.453,40
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	783,14	852,34	817,05	826,78	880,08
Proporsi terhadap PDRB (% ADHB)	1,87	1,97	1,87	1,80	1,76

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir LNPRT menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir LNPRT adh Berlaku sebesar 1.137,73 miliar rupiah, kemudian terus meningkat hingga pada tahun 2019 nilainya mencapai 1.299,67 miliar rupiah, namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020 menjadi sebesar 1.232,91 miliar rupiah. Pada tahun 2021, perekonomian Musi Banyuasin kembali tumbuh, begitu juga konsumsi LNPRT yang meningkat menjadi 1.306,02 miliar rupiah di tahun 2021 dan 1.453,40 miliar rupiah di tahun 2022. Demikian halnya dengan konsumsi LNPRT adh Konstan 2010 yang secara umum juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun, kecuali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran LNPRT dari sisi kuantitas. Sepanjang tahun 2018 hingga 2022, peran LNPRT terhadap total PDRB cenderung konstan, dari 1,87 persen di tahun 2018 menjadi 1,76 persen pada tahun 2022.

3.4 PERKEMBANGAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH

Konsumsi akhir pemerintah bersama dengan pengeluaran akhir rumah tangga dan LNPRRT merupakan jumlah dari konsumsi akhir dalam suatu perekonomian suatu wilayah. Peranan konsumsi pemerintah dalam perekonomian Kabupaten Musi Banyuasin serta bagaimana perkembangannya akan dijelaskan dalam uraian dibawah ini.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 - 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB (Miliar Rp)	3.866,85	4.181,84	3.997,61	4.284,66	4.227,08
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	2.802,97	2.937,74	2.803,78	2.852,94	2.912,00
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	6,35	6,35	6,06	5,89	5,11
Konsumsi Pemerintah per- kapita (Ribu Rp)					
a. ADHB	6.054,95	6.442,66	6.438,84	6.832,82	6.676,54
b. ADHK 2010	4.389,07	4.525,97	4.515,96	4.549,63	4.599,41
Pertumbuhan ⁵					
a. Total konsumsi pemerintah	1,72	4,81	-4,56	1,75	2,07
b. Konsumsi perkapita	0,31	3,12	-0,22	0,75	1,09

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, pengeluaran konsumsi akhir pemerintah menunjukkan peningkatan, baik untuk adh Berlaku maupun adh Konstan 2010. Pada tahun 2018 total pengeluaran konsumsi akhir pemerintah adh Berlaku sebesar 3.866,85 miliar rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2019 mencapai 4.181,84 miliar rupiah. Akan tetapi terjadi penurunan total konsumsi pemerintah pada tahun 2020 menjadi sebesar 3.997,61 miliar rupiah akibat pandemi Covid-19, dan kembali meningkat menjadi 4.284,66 pada tahun 2021. Di tahun 2022, pengeluaran konsumsi pemerintah adalah sebesar 4.227,08 miliar rupiah. Selanjutnya, konsumsi pemerintah adh Konstan 2010 juga mengalami peningkatan pada masing-masing tahun kecuali pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan, bahwa secara riil telah terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah dari sisi kuantitas meskipun di tahun 2020 terhambat karena situasi pandemi yang melanda.

⁵ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan /ADHK 2010)

Menarik untuk dicermati lebih lanjut bahwa proporsi pengeluaran akhir pemerintah terhadap PDRB juga mengalami kestabilan yaitu sekitar 6 persen hingga tahun 2020, dan mulai menurun di tahun 2021. Sepanjang periode tersebut, proporsi terendah terjadi pada tahun 2022 yaitu 5,11 persen, sedangkan proporsi tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 yang mencapai 6,35 persen.

Dalam prakteknya, pengeluaran pemerintah seringkali dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat (publik). Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total menunjukkan peningkatan, hal ini diikuti oleh adanya peningkatan pada rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita. Pada tahun 2018 konsumsi pemerintah per-kapita adh Berlaku sebesar 6.054,95 ribu rupiah, dan meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga tahun 2022 menjadi sebesar 6.676,54 ribu rupiah.

Rata-rata konsumsi pemerintah per-kapita adh Konstan (2010) menunjukkan adanya pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahunnya (lihat tabel 11). Gejolak tersebut menunjukkan adanya perubahan pengeluaran konsumsi pemerintah secara kuantitan.

3.5 PERKEMBANGAN PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)⁶. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB					
a. ADHB (<i>miliar Rp</i>)	19.949,57	19.790,52	20.523,03	20.495,94	21.850,13
b. ADHK 2010 (<i>miliar Rp</i>)	14.091,52	13.849,00	14.258,45	13.652,04	13.102,41
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	32,78	30,07	31,12	28,18	26,41
Struktur PMTB ⁷					
a. Bangunan (<i>miliar Rp</i>)	13.702,85	13.748,75	14.033,28	14.939,62	17.071,61
(%)	(68,69)	(69,47)	(68,38)	(72,89)	(78,13)
b. Non Bangunan (<i>miliar Rp</i>)	6.246,72	6.041,77	6.489,76	5.556,32	4.778,52
(%)	(31,31)	(30,53)	(31,62)	(27,11)	(21,87)
Total PMTB (<i>miliar Rp</i>)	19.949,57	19.790,52	20.523,03	20.495,94	21.850,13
(%)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)	(100,00)
Pertumbuhan ⁸ (%)					
a. Bangunan	2,37	1,54	1,37	1,11	3,48
b. Non Bangunan	3,75	-7,84	6,24	-14,83	-21,61
Total PMTB	2,85	-1,72	2,96	-4,25	-4,03

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Peningkatan yang terjadi pada komponen konsumsi akhir (rumah tangga maupun pemerintah) tidak terjadi pada PMTB di tahun 2022. Data di atas menjelaskan bahwa secara keseluruhan pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2018 - 2022 berfluktuasi dari 2,85

⁶ Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor

⁷Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga berlaku /ADHB)

⁸ Diturunkan dari perhitungan PDRB (atas dasar harga konstan/ADHK 2010)

persen (2018) dan bernilai negatif 1,72 persen (2019). Selanjutnya pertumbuhan PMTB kembali tumbuh positif sebesar 2,96 persen (2020), namun kembali berkontraksi sebesar 4,25 persen (2021). Pada tahun 2022, pertumbuhan PMTB kembali bernilai negatif sebesar 4,03 persen. Pertumbuhan PMTB pada masing-masing komponen sangat bervariasi antar tahunnya. Sub komponen bangunan merupakan komponen dengan proporsi terbesar dalam pembentukan modal tetap. Pertumbuhan di sektor bangunan polanya relatif stabil bila dibandingkan dengan pertumbuhan sub komponen PMTB non bangunan.

Proporsi non bangunan terhadap total PMTB relatif berfluktuasi selama periode 2018 - 2022 (tabel 12). Perubahan yang terjadi pada proporsi tersebut tidak lepas dari pengaruh pertumbuhan yang terjadi pada masing-masing sub komponen PMTB tersebut. Pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan sebesar 2,37 persen (2018), lalu melambat menjadi 1,54 persen (2019), sebesar 1,37 persen (2020), dan 1,11 persen (2021). Pada tahun 2022, pertumbuhan "riil" sub komponen bangunan kembali meningkat mencapai 3,48 persen.

Sementara itu, sub komponen non bangunan menunjukkan pola berbeda. Dalam periode tahun 2018 s.d. 2022 pertumbuhan non bangunan mengalami fluktuasi dari 3,75 persen (2018) hingga bernilai negatif 7,84 persen pada 2019, selanjutnya kembali mampu meningkat sebesar 6,24 persen (2020). Pertumbuhan yang kembali meningkat di tahun 2020 ini disumbangkan oleh pengadaan pemerintah berupa alat-alat kesehatan, peralatan pendukung kesehatan hingga peningkatan fasilitas kesehatan selama pandemi Covid-19. Sementara itu, di tahun 2021 pertumbuhannya sub komponen non bangunan kembali berkontraksi sebesar 14,83 persen, dan tetap berkontraksi di tahun 2022 sebesar 21,61 persen.

3.6 PERKEMBANGAN PERUBAHAN INVENTORI

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk “**persediaan**” berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif. Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

**Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori
Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori					
a. ADHB (Miliar Rp)	-606,79	104,53	- 587,56	35,30	-6,56
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-500,77	94,91	-586,19	22,39	-6,39
Proporsi terhadap PDRB					
(% - ADHB)	-1,00	0,16	-0,89	0,05	-0,01

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis secara rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam

PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2018 inventori mengalami pengurangan persediaan sebesar 606,79 miliar rupiah, lalu mengalami penambahan persediaan kembali pada tahun 2019 sebesar 104,53 miliar rupiah, di tahun 2020 kembali mengalami pengurangan persediaan sebesar 587,56 miliar rupiah, selanjutnya pada tahun 2021 terjadi penambahan inventori sebesar 35,30 miliar rupiah. Pada tahun 2022, inventori kembali berkurang sebesar 6,56 miliar rupiah.

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

3.7 PERKEMBANGAN NET EKSPOR BARANG DAN JASA

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi domestik, tetapi dikonsumsi oleh pihak luar baik luar negeri, luar provinsi maupun luar kabupaten baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin. Perkembangan yang terjadi pada transaksi impor menunjukkan semakin kuatnya ketergantungan Kabupaten Musi Banyuasin terhadap ekonomi atau produk wilayah lain. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Musi Banyuasin di luar wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

Sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungannya itu dengan cara mengurangi nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor). Pada akhirnya, operasi ekspor dikurangi impor disebut net ekspor.

**Tabel 14. Perkembangan Net Ekspor Barang dan Jasa
Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 - 2022**

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Net Ekspor					
a. ADHB (Miliar Rp)	-7.309,00	-5.879,36	-5.737,56	-2.017,68	1.331,39
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	-1.990,69	-1.506,24	-650,40	-11,27	744,34
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	-12,01	-8,93	-8,70	-2,77	1,61

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Secara total, nilai net ekspor Kabupaten Musi Banyuasin selama tahun 2018 hingga 2021 selalu bernilai negatif karena kebutuhan masyarakat masih banyak bergantung pada barang-barang dari luar wilayah Musi Banyuasin. Namun di tahun 2022, terjadi pegeseran net ekspor menjadi bernilai positif. Artinya mulai ada pergeseran kebutuhan yang di tahun 2022 pemenuhan kebutuhan dari ekspor lebih besar daripada impor, sejalan dengan tingginya ekspor kategori pertambangan dan penggalan dari Kabupaten Musi Banyuasin ke luar wilayah Musi Banyuasin.

Pada tahun 2018, nilai net ekspor bernilai negatif 7.309,00 miliar rupiah, negatif 5.879,36 miliar rupiah (2019), negatif 5.737,56 miliar rupiah (2020) dan mencapai negatif 2.017,68 miliar rupiah (2021). Sedangkan pada tahun 2022 nilai net ekspor bernilai positif 1.331,39 miliar rupiah. Sejalan dengan nilai net ekspor adh Berlaku, nilai net ekspor adh Konstan 2010 juga menunjukkan arah yang sama. Nilai "riil" masing-masing tahun sebesar negatif 1.990,69 miliar rupiah (2018), negatif 1.506,24 miliar rupiah (2019); negatif 650,40 miliar rupiah (2020) dan negatif 17,37 miliar rupiah (2021). Pada tahun 2022, nilai adh Konstan 2010 net ekspor bernilai positif sebesar 744,34 miliar rupiah.

BAB IV

PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB MENURUT PENGELUARAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2018-2022

4

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disajikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam suatu wilayah ekonomi domestik, dimana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB per kapita.

**Tabel 15. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Musi Banyuasin, Tahun 2018 – 2022**

U r a i a n	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (<i>Miliar Rp</i>)					
- ADHB	60.861,46	65.811,00	65.943,88	72.744,72	82.736,54
- ADHK 2010	42.670,21	44.620,40	44.604,66	46.129,29	48.097,66
PDRB perkapita (<i>Ribu Rp</i>)					
- ADHB	95.300,78	101.390,41	106.213,95	116.007,34	130.679,83
- ADHK 2010	66.815,75	68.743,54	71.843,46	73.563,22	75.968,78
Pertumbuhan					
PDRB perkapita ADHK 2010	1,79	2,89	4,51	2,39	3,27

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun (Tabel 15), seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Musi Banyuasin rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per-kapita di masing-masing tahun tersebut. Perhitungan PDRB per kapita di tahun 2022 mengalami pembaruan, yaitu pada penggunaan data jumlah penduduk. Nilai PDRB per kapita pada tahun 2018 menggunakan data jumlah penduduk Proyeksi SP 2010, nilai PDRB per kapita untuk tahun 2019 menggunakan data jumlah penduduk hasil SUPAS 2015, dan nilai PDRB per kapita tahun 2020-2022 menggunakan data jumlah penduduk Proyeksi Interim SP 2020.

Sementara itu pertumbuhan PDRB per-kapita secara “riil” mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB per-kapita sebesar 1,79 persen. Kemudian meningkat pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 2,89 persen, 4,51 persen, 2,39 persen, dan 3,27 persen.

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 16. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir Terhadap PDRB Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 – 2022

Uraian	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) (Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	43.823,11	46.313,80	46.515,45	48.640,49	53.881,10
b. LNPRT	1.137,73	1.299,67	1.232,91	1.306,02	1.453,40
c. Pemerintah	3.866,85	4.181,84	3.997,61	4.284,66	4.227,08
Jumlah	48.827,68	51.795,31	51.745,97	54.231,17	59.561,58
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	60.861,46	65.811,00	66.943,88	72.744,72	82.736,54
Proporsi	80,23	78,70	78,47	74,55	71,99

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

4.3 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t = PMTB tahun ke t

Y_t = Output tahun ke t

Y_{t-1} = Output tahun ke t-1

**Tabel 17. Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018-2022**

Uraian	2018	2019	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PDRB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	42.670,21	44.620,40	46.129,29	48.097,66
Perubahan (Miliar Rp)	1.328,95	1.950,19	1.524,63	1.968,37
PMTB (ADHK 2010) (Miliar Rp)	14.091,52	13.849,00	13.652,04	13.102,41
ICOR	10,60	7,10	8,95	6,66

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

*Catatan: Perhitungan ICOR tahun 2020 tidak dilakukan karena ada faktor pandemi Covid-19 yang mengakibatkan nilai ICOR tidak dapat dijadikan sebagai dasar analisis sebagaimana terjadi pada kondisi normal

BAB V

PENUTUP

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

5

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2018 s.d. 2022 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir baik untuk tujuan konsumsi akhir investasi (fisik), maupun perdagangan internasional dan antar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi investasi dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga, dan pegawai negeri), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2018 s.d. 2022 sehingga mudah dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antar waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan *disposable*, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana.
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar negeri (*external account*) secara agregat disajikan disini seperti ekspor dan impor dan transfer berjalan (*current transfer*) neto. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Musi Banyuasin terhadap ekonomi negara lain (*rest of the world*).

LAMPIRAN



<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

5

Lampiran 1.1

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	43.823.108,35	46.313.799,06	46.515.449,21	48.640.487,14	53.881.099,20
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	26.529.837,73	27.972.300,32	28.369.626,48	29.609.763,04	33.048.969,42
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.630.851,22	1.713.635,82	1.737.289,30	1.841.353,80	2.021.225,21
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	4.274.308,95	4.592.062,94	4.606.718,12	4.861.952,64	5.408.918,63
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	2.825.245,00	2.991.812,65	3.125.931,14	3.282.138,58	3.544.217,66
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4.514.214,98	4.835.167,20	4.619.722,44	4.760.947,80	5.209.733,85
1.f. Hotel dan Restoran	2.873.301,91	2.996.055,31	2.769.551,19	2.919.123,73	3.215.020,05
1.g. Lainnya	1.175.348,54	1.212.764,83	1.286.610,55	1.365.207,56	1.433.014,37
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.137.725,15	1.299.673,97	1.232.910,44	1.306.020,26	1.453.401,67
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.866.845,17	4.181.835,92	3.997.609,85	4.284.658,05	4.227.078,03
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	19.949.570,41	19.790.520,83	20.523.033,22	20.495.937,07	21.850.128,54
4.a. Bangunan	13.702.851,67	13.748.753,63	14.033.277,63	14.939.616,36	17.071.613,08
4.b. Non-Bangunan	6.246.718,74	6.041.767,20	6.489.755,60	5.556.320,71	4.778.515,46
5. Perubahan Inventori	-606.793,59	104.528,92	-587.561,69	35.298,93	-6.561,50
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-7.308.997,07	-5.879.363,62	-5.737.556,34	-2.017.676,77	1.331.393,92
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	60.861.458,42	65.810.995,08	65.943.884,71	72.744.724,68	82.736.539,85

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.2

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	27.484.041,93	28.392.646,93	27.961.974,48	28.786.413,56	30.465.212,25
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	16.239.164,74	16.888.852,29	16.680.716,02	17.281.647,10	18.333.623,88
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	1.115.410,08	1.140.999,92	1.135.180,82	1.136.873,18	1.183.428,49
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2.498.706,20	2.560.395,24	2.553.771,99	2.572.026,78	2.740.901,95
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	1.816.739,42	1.879.243,70	1.933.892,29	1.990.807,90	2.061.456,28
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	3.013.255,24	3.072.816,15	2.929.513,78	2.986.044,17	3.158.299,30
1.f. Hotel dan Restoran	1.913.913,89	1.943.328,43	1.797.489,77	1.858.083,26	2.000.445,55
1.g. Lainnya	886.852,37	907.011,19	931.409,79	960.931,18	987.056,80
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	783.136,22	852.335,71	817.049,01	826.778,97	880.081,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.802.967,64	2.937.737,79	2.803.776,94	2.852.937,46	2.911.998,57
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	14.091.521,31	13.849.003,82	14.258.449,73	13.652.041,31	13.102.413,69
4.a. Bangunan	9.191.513,00	9.333.369,94	9.461.237,10	9.566.466,64	9.899.754,45
4.b. Non-Bangunan	4.900.008,31	4.515.633,89	4.797.212,62	4.085.574,67	3.202.659,23
5. Perubahan Inventori	-500.769,68	94.913,24	-586.188,00	22.391,33	-6.391,72
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-1.990.690,30	-1.506.237,77	-650.402,14	-11.272,05	744.341,84
PDRB (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	42.670.207,11	44.620.399,72	44.604.660,02	46.129.290,59	48.097.656,07

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.3

Tabel 3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	72,00	70,37	70,54	66,86	65,12
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	43,59	42,50	43,02	40,70	39,94
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,68	2,60	2,63	2,53	2,44
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	7,02	6,98	6,99	6,68	6,54
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,64	4,55	4,74	4,51	4,28
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	7,42	7,35	7,01	6,54	6,30
1.f. Hotel dan Restoran	4,72	4,55	4,20	4,01	3,89
1.g. Lainnya	1,93	1,84	1,95	1,88	1,73
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,87	1,97	1,87	1,80	1,76
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	6,35	6,35	6,06	5,89	5,11
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	32,78	30,07	31,12	28,18	26,41
4.a. Bangunan	22,51	20,89	21,28	20,54	20,63
4.b. Non-Bangunan	10,26	9,18	9,84	7,64	5,78
5. Perubahan Inventori	-1,00	0,16	-0,89	0,05	-0,01
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-12,01	-8,93	-8,70	-2,77	1,61
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.4

Tabel 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	4,42	3,31	-1,52	2,95	5,83
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	4,68	4,00	01,23	3,60	6,09
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	3,00	2,29	-0,51	0,15	4,10
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	2,30	2,47	-0,26	0,71	6,57
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	4,25	3,44	2,91	2,94	3,55
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,60	1,98	-4,66	1,93	5,77
1.f. Hotel dan Restoran	6,26	1,54	-7,50	3,37	7,66
1.g. Lainnya	3,59	2,27	2,69	3,17	2,72
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,29	8,84	-4,14	1,19	6,45
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,72	4,81	-4,56	1,75	2,07
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	2,85	-1,72	2,96	-4,25	-4,03
4.a. Bangunan	2,37	1,54	1,37	1,11	3,48
4.b. Non-Bangunan	3,75	-7,84	6,24	-14,83	-21,61
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	3,21	4,57	-0,04	3,42	4,27

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.5

Tabel 5. Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	159,45	163,12	166,35	168,97	176,86
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	163,37	165,63	170,07	171,34	180,26
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	146,21	150,19	153,04	161,97	170,79
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	171,06	179,35	180,39	189,03	197,34
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	155,51	159,20	161,64	164,86	171,93
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	149,81	157,35	157,70	159,44	164,95
1.f. Hotel dan Restoran	150,13	154,17	154,08	157,10	160,72
1.g. Lainnya	132,53	133,71	138,14	142,07	145,18
2. Pengeluaran Konsumsi LNPR	145,28	152,48	150,90	157,96	165,14
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	137,96	142,35	142,58	150,18	145,16
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	141,57	142,90	143,94	150,13	166,76
4.a. Bangunan	149,08	147,31	148,32	156,17	172,44
4.b. Non-Bangunan	127,48	133,80	135,28	136,00	149,20
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	142,63	147,49	147,84	157,70	172,02

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Lampiran 1.6

Tabel 6. Laju Pertumbuhan Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto (2010=100) Kabupaten Musi Banyuasin Menurut Pengeluaran, 2018-2022 (persen)

Komponen Pengeluaran (1)	2018 (2)	2019 (3)	2020 (4)	2021* (5)	2022** (6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (1.a. s/d 1.g.)	3,56	2,30	1,98	1,57	4,67
1.a. Makanan, Minuman, dan Rokok	3,17	1,38	2,69	0,74	5,21
1.b. Pakaian dan Alas Kaki	2,93	2,72	1,90	5,83	5,45
1.c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga	6,00	4,85	0,58	4,79	4,40
1.d. Kesehatan dan Pendidikan	3,91	2,37	1,53	2,00	4,28
1.e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya	4,19	5,03	0,22	1,11	3,46
1.f. Hotel dan Restoran	2,16	2,69	-0,06	1,96	2,30
1.g. Lainnya	5,14	0,89	3,31	2,85	2,19
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	3,78	4,96	-1,04	4,68	4,54
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,01	3,18	0,16	5,33	-3,34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	1,60	0,94	0,72	4,30	11,08
4.a. Bangunan	2,54	-1,19	0,69	5,29	10,42
4.b. Non-Bangunan	-0,28	4,95	1,11	0,53	9,71
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,26	3,41	0,24	6,67	9,08

*Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

DAFTAR PUSTAKA

<https://musibanyuasinkab.bps.go.id>

5

1. Badan Pusat Statistik, *Tabel Input Output Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
2. _____, *Pendapatan Nasional Indonesia*, berbagai seri, Jakarta.
3. _____, *Statistik Matriks Investasi Pemerintah Pusat*, berbagai seri, Jakarta.
4. _____, *Profil Ekonomi Rumahtangga 1998*, Jakarta 1999.
5. Frenken Jim, *How To Measure Tangible Capital Stocks*, Netherlands, 1992.
6. Host Poul, Madsen, *Macroeconomic Accounts An Overview*, Pamphlet Series, No. 29, Washington DC, 1979.
7. Keuning. J. Steven, *An Estimate of the Fixed Capital Stock By Industry and Types of Capital Goods in Indonesia*, Statistical Analysis Capability Program, Project Working Paper, Series No.4, Jakarta 1988.
8. _____, *Input-Output Table and Analysis*, Studies in Methods, Series F No. 14 Rev 1, New York, 1973.
9. _____, *Handbook of National Accounting for Production*, Sources and Methods, Series F No. 39, New York, 1986.
10. Verbiest Piet, *Investment Matrix*, Hasil Kerjasama Asian Development Bank dengan Badan Pusat Statistik, Jakarta, 1997.
11. Ward, Michael, *The Measurement of Capital: Methodology of Capital Stock Estimates in OECD Countries*, Paris, 1976.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Jl. Merdeka Lk. 1 Sekayu 30711

Telp/Fax(0714) 321023, Email: bps1606@bps.go.id

ISSN 2776-6667

